

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bidang ekonomi di Indonesia saat ini membuat peran akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan semakin meningkat. Akuntansi berperan dalam menyediakan data atau informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan agar tidak terjadi kesalahan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tata kelola administrasi yang baik merupakan salah satu bentuk pencapaian dalam melaksanakan tugas membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengakui pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus terus berusaha untuk lebih mengembangkan keterusterangan dan tanggung jawab dalam administrasi moneter wilayah. Administrasi moneter provinsi mengontrol semua perspektif khusus termasuk pedoman, pendirian, kerangka kerja data moneter teritorial, dan pemahaman atas akuntansi keuangan daerah.

Pemerintah lingkungan diperlukan untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban menggunakan kerangka pembukuan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat sebagai undang-undang dan undang-undang tidak resmi. Dalam sistem pemerintah daerah terdapat 2 subsistem laporan akuntansi, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan

keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin (Megawati, dkk: 2015).

Menurut Tiya Lestari dan Sri (2020), Laporan moneter berkualitas menerangkan kepala wilayah dapat diandalkan berimbang kewenangan diberikan kepadanya menyelesaikan kewajibannya menyelesaikan kewajiban untuk berurusan dengan asosiasi. Laporan moneter dapat memberikan keuntungan bagi kliennya, laporan keuangan harus memiliki harga data yang berkualitas dan berharga untuk interaksi yang dinamis.

Sifat ringkasan fiskal dapat dilihat dari kualitas subjektif laporan anggaran. Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, atribut subjektif laporan anggaran pemerintah yang mengatur persyaratan tertuang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan meliputi keterpahaman, relevansi, keandalan, dan daya banding. Jika data yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah terdekat memenuhi pedoman yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah lingkungan dapat mengerjakan sifat data pada laporan keuangan pemerintah terdekat.

Laporan moneter yang disampaikan oleh pemerintah terdekat dipakai beberapa orang berkontribusi sehingga menjadi dinamis, sehingga harus dijunjung tinggi sifat perangkat pemerintah lingkungan di bidang administrasi dan tanggung jawab keuangan provinsi dengan tujuan agar sifat data pembukuan yang dibuat dapat dipercaya dan tepat. Klien ringkasan anggaran pemerintah antara lain, lembaga pengawas masyarakat, lembaga pemeriksa, para wakil rakyat, pihak yang memberi atau mengambil bagian dalam interaksi hadiah, pendukung keuangan, bank, dan individu lain yang diinvestasikan. Laporan pertanggungjawaban

administrasi moneter wilayah selama satu tahun anggaran adalah sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapat penilaian sebagai penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (bali.bpk.go.id).

Ikhtisar Dampak dari penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester 1 tahun 2019, BPK menemukan tiga persoalan terkait sumber daya. Pertama, komando atas administrasi sumber daya tetap dalam layanan dan organisasi tidak cukup, antara lain, ada sumber daya tetap dengan keseimbangan kurang dari Rp. 2,11 triliun. Kedua, ada sumber daya tetap di 12 jasa dan perusahaan yang belum terdata kepemilikannya sebesar Rp 55,92 triliun. Ketiga, sumber daya tetap di 16 layanan dan perusahaan dikendalikan dan dimanfaatkan oleh berbagai perkumpulan hingga mencapai Rp97,18 triliun (m.bisnis.com).

LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, BPK RI masih mendapat beberapa masalah yang harus menjadi pertimbangan pemerintah umum Bali. Seperti perencanaan dan tanggung jawab pencipta penghargaan tidak memuaskan, pengungkapan dan tanggung jawab BPK kepada pemerintah lingkungan dan kota lainnya tidak sesuai aturan khusus, dan administrasi Gedung Negara Pemerintah Provinsi Bali tidak sesuai pengaturan (balitribune.co.id).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu aturan di Provinsi Bali yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019. Namun, dari pemeriksaan audit tentu ada beberapa catatan dan perbaikan-perbaikan yang terjadi selama pemeriksaan yakni terkait

asset keuangan, pajak dan kualitas perencanaan pengelolaan anggaran (prokomsetda.bulelengkab.go.id).

Berdasarkan hasil audit BPK RI, Pemkab Buleleng diwajibkan untuk melunasi seluruh kewajiban kepada UD Serba Jaya bertambah sampai dengan Rp 94.479.750, dan membayar bunga sebesar 6% setiap tahun untuk waktu yang sangat lama. Tagihan tersebut muncul dari pembelian berbagai keperluan kantor secara bon oleh Pemkab Buleleng sejak tahun 2008-2012. Dari tagihan tersebut, sebesar Rp 94.479.750, tidak diakui oleh Pemkab Buleleng, karena pembelian secara bon itu tidak tercatat dalam pembukuan. Kemudian, pemilik UD Serba Jaya, Ketut Suryata mengajukan gugatan dengan nomor registrasi 360/Pdt.G/2014/PN SGR. Dalam proses hukum tersebut, Pemkab dinyatakan kalah dan mewajibkan Pemkab Buleleng melunasi utang tersebut dengan membuat rekening pembayaran utang dalam APBD dengan acuan keputusan pengadilan yang memproses sengketa utang piutang dengan pihak ketiga (bali.bpk.go.id).

Mengingat keajaiban ini, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa dalam iklim otoritas publik, daerah Kabupaten Buleleng masih terdapat beberapa kekurangan yang menunjukkan bahwa data moneter belum sepenuhnya memenuhi syarat sehingga signifikansi, kewajaran, dan ketepatan data yang disampaikan dalam laporan fiskal belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, diperlukan adanya perbaikan sistem kerja pegawai pemerintah daerah terutama dengan tujuan agar sifat data moneter yang disampaikan bermanfaat dan memiliki nilai data solid dan tepat. Rendahnya kualitas data yang diperkenalkan dalam laporan moneter pemerintah terdekat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya

motivasi kerja karyawan, pengelola keuangan yang kurang berkompeten, kurangnya pengalaman kerja, dan tingkat pengawasan yang rendah.

Faktor pertama yang dapat menyebabkan kualitas informasi keuangan kurang berkualitas yaitu kurangnya motivasi kerja karyawan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada karyawan sub bagian keuangan OPD Kabupaten Buleleng, terdapat beberapa karyawan yang merasakan kurangnya kesejahteraan kerja dan tunjangan yang didapat sehingga menyebabkan karyawan kurang memiliki dorongan atau semangat dalam menjalankan tugas dan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal. Dengan motivasi yang diperoleh dapat memberikan semangat dan karyawan lebih berkontribusi dalam pelaksanaan tugas sehingga memaksimalkan hasil pekerjaan dan meminimalkan kekeliruan atau kesalahan. Menurut Holle (2019), Inspirasi kerja di pemerintahan lebih ditujukan pada pemberian kekuatan dan dukungan pada seorang spesialis berpengaruh melaksanakan kewajiban serta tugasnya pada administrasi luas. Memberikan inspirasi pada pekerja menciptakan eksekusi ideal dalam menanggapi daerah setempat. Semakin baik tingkat inspirasi kerja yang digerakkan oleh perwakilan, semakin baik pameran pekerja menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

Menurut Pancala (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi kerja memengaruhi sifat laporan moneter. Daripada pemeriksaan diarahkan oleh Ilham, dkk (2019) efek samping dari pemeriksaannya menunjukkan bahwa inspirasi tidak berdampak pada kualitas ulasan. Efek samping dari penyelidikan masa lalu menunjukkan bahwa ada kontras atau ketidakberesan antara satu pemeriksaan dengan pemeriksaan lainnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas data yang lebih rendah tentang pengumuman moneter adalah kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan. Memiliki pekerjanya banyak, namun tanpa kapasitas dan kemampuan sesuai proyek/latihan yang dilaksanakan dapat menimbulkan pemborosan karena kenyataannya tidak dapat berkontribusi instansi. Menurut Darmawan (2016), berhasil atau tidaknya kerangka administrasi moneter sangat bergantung pada keterampilan administratornya, sehingga bekerja pada sifat SDM adalah suatu keharusan. Kompetensi yang dimiliki karyawan, hal ini dapat dilihat dari landasan edukatif, pelatihan-pelatihan yang diikuti, dan dari keterampilan tertuang pelaksanaannya tugasnya. Namun, pada hasil survei ditemukan bahwa sebagian besar karyawan bagian keuangan OPD Kabupaten Buleleng memiliki latar belakang pendidikan di luar bidang akuntansi atau keuangan, kurang mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah serta beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan lain diluar tugas yang didapat sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan tugas utama.

Selain pengelola keuangan yang kurang berkompeten, kurangnya pengalaman kerja karyawan juga dapat menjadi faktor rendahnya kualitas informasi keuangan. Menurut Laksmi (2019), dengan menekuni bekerja berulang-ulang, seorang individu akan lebih siap untuk menyelesaikan komitmennya dan membuka kesempatan untuk memperoleh lebih banyak strategi kerja pragmatis, efektif, bermanfaat. Faktor kapasitas individu tidak bisa sebatas pada pendidikan dan kesiapan, juga dapat diamati pemahaman pekerjaan selama bekerja dalam pergaulan masa lalu. Wawasan kerja yang profesional di bidang akuntansi akan

memberikan akurasi yang lebih besar dalam perencanaan anggaran dan laporan keuangan.

Menurut Afnany (2018), semakin banyak pengalaman karyawan dalam bidangnya akan semakin banyak pula hasil dari pekerjaannya. Pada hasil survei yang dilakukan, terdapat beberapa karyawan kurang memiliki pengalaman yang cukup lama pada bidang akuntansi dalam mengelola laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan latar belakang pendidikan karyawan tidak sesuai dengan bidang yang dikerjakan saat ini. Penerimaan karyawan baru yang kurang mahir, tidak sesuai dengan bidangnya dan belum merasakan dunia pekerjaan yang cukup lama terlebih dalam ilmu akuntansi atau keuangan pemerintahan menyebabkan pengelolaan keuangan kurang efektif.

Menurut Darmawan, dkk (2017), hasil penelitiannya menerangkan pengalaman kerja berpengaruh positif dan penting bagi sifat ringkasan anggaran. Daripada pemeriksaan yang dipimpin Budiono, dkk (2018), konsekuensi dari investigasi menunjukkan pengalaman kerja tidak memiliki dampak besar pada sifat laporan moneter teritorial. Akibat dari pemeriksaan yang lalu menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakberesan antara pemeriksaan yang satu dengan pemeriksaan yang lain.

Faktor terakhir yang dapat memengaruhi sifat data moneter adalah tingkat pengawasan keuangan yang ada pada pemerintahan. Kerangka kerja akan berjalan dengan baik jika ada pengawasan untuk menjamin kerangka dilaksanakan sesuai rencana, membantu laporan keuangan yang berkualitas. Adanya kebutuhan manajemen dalam pelaksanaan APBD agar siklus terlaksana dengan baik sehingga dapat menyampaikan laporan moneter dengan tepat (Suparwati, 2019).

Berdasarkan hasil survei pada karyawan sub bagian keuangan OPD Kabupaten Buleleng bahwa beberapa karyawan kurang menerima informasi dari transaksi keuangan yang telah dilakukan, data yang diterima tidak konkret dan terjadi ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya di lapangan dengan kondisi yang dikerjakan dalam laporan. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem pengawasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik selama pelaksanaan kerja karyawan.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan penting diamati apakah pengaturan elah diatur dapat terlaksana konsekuen produktif, layak, finansial. Macam-macam manajemen yang dilakukan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan atasan langsung oleh Kepala Dinas dan pengawasan secara rutin oleh inspektorat daerah. Sedangkan pengawasan ekstern merupakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika pengawasan tidak dilakukan dengan benar, administrasi moneter provinsi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya Widyasih (2019), efek samping dari investigasi menunjukkan bahwa pengawasan dan keterampilan SDM secara signifikan mempengaruhi sifat laporan moneter. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2018), menunjukkan bahwa secara tidak lengkap, variabel kapabilitas aset manusia berpengaruh negatif terhadap sifat ringkasan anggaran asosiasi non-manfaat dan variabel kontrol tidak berdampak pada sifat laporan moneter. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara penelitian yang satu dengan yang lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen, subjek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini

menggunakan variabel independen yaitu motivasi kerja, kompetensi pengelola keuangan, pengalaman kerja dan tingkat pengawasan. Penggunaan variabel tersebut karena berdasarkan hasil survei atau observasi awal pada karyawan sub bagian keuangan OPD Kabupaten Buleleng masih terdapat beberapa karyawan kurang memiliki dorongan atau semangat dalam menjalankan tugas, kompetensi yang masih minim karena kurang mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait akuntansi atau pengelolaan keuangan, kurang memiliki pengalaman di bidang keuangan serta sistem pengawasan belum berjalan dengan baik selama pelaksanaan kerja. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan bagian keuangan yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Sedangkan daerah pemeriksaan dalam penyelidikan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bertujuan untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan sebelumnya dan juga untuk menemukan penyelesaian dan solusi dalam permasalahan yang muncul yakni terkait informasi keuangan yang masih kurang berkualitas pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Informasi pada laporan moneter yang berkualitas rendah dapat memberikan kebebasan terhadap anomali dan blunder di bidang moneter, kesulitan dalam memutuskan, dan program kerja lainnya yang tidak tersusun. Dengan dilakukannya eksplorasi ini juga untuk mendemonstrasikan dan membedah komponen-komponen yang dapat memengaruhi sifat data moneter di OPD Kabupaten Buleleng. Mengingat penggambaran fondasi, pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi

dengan judul, **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat fondasi tersebut, perbahasan yang dapat dikenali yaitu:

1. Karyawan merasakan kurangnya kesejahteraan kerja dan tunjangan yang didapat sehingga menyebabkan karyawan kurang memiliki dorongan atau semangat dalam menjalankan tugas dan hasil pekerjaan menjadi kurang maksimal.
2. Karyawan bagian keuangan OPD Kabupaten Buleleng memiliki landasan instruktif di luar pembukuan atau uang, kurang mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah serta beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan lain diluar tugas yang didapat sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan tugas utama.
3. Penerimaan karyawan baru yang kurang mahir, tidak sesuai dengan bidangnya dan belum merasakan dunia pekerjaan yang cukup lama terlebih dalam ilmu akuntansi atau keuangan pemerintahan menyebabkan pengelolaan keuangan kurang efektif.
4. Karyawan kurang menerima informasi dari transaksi keuangan yang telah dilakukan, data yang diterima tidak konkret dan terjadi ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya di lapangan dengan kondisi yang dikerjakan dalam laporan. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem pengawasan belum sepenuhnya berjalan dengan baik selama pelaksanaan kerja karyawan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus pada topik dan mencegah percakapan yang terlalu luas yang membawa kesalahan dari tujuan yang disampaikan, untuk situasi ini dibuat batasan unsur-unsur yang digunakan sebagai faktor eksplorasi yaitu Motivasi Kerja, Kompetensi Pengelola Keuangan, Pengalaman Kerja dan Tingkat Pengawasan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada OPD Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Mengingat bukti persoalan dapat dikenali dan pembatasan masalah, rencana masalah dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi pengaruh inspirasi pekerjaan terhadap sifat data moneter pada OPD Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kemampuan kepala moneter mempengaruhi sifat data moneter di OPD Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pengaruh pengalaman kerja terhadap sifat data moneter di OPD Kabupaten Buleleng?
4. Apakah derajat pengawasan moneter mempengaruhi sifat data moneter pada OPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengingat rencana persoalan selesai, tujuan eksplorasi yaitu:

1. Untuk menaksirkan dampaknya motivasi kerja terhadap kualitas informasi keuangan pada OPD Kabupaten Buleleng.

2. Untuk menaksirkan dampaknya kompetensi pengelola keuangan terhadap kualitas informasi keuangan pada OPD Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menaksirkan dampaknya pengalaman kerja terhadap kualitas informasi keuangan pada OPD Kabupaten Buleleng.
4. Untuk menaksirkan dampaknya tingkat pengawasan keuangan terhadap kualitas informasi keuangan pada OPD Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil eksplorasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara hipotetis maupun pada dasarnya untuk semua kelompok yang diidentifikasi dengan penelitian ini. Keuntungan dari eksplorasi:

1. Manfaat Teoritis

Pemeriksaan ini diandalkan untuk memberikan keuntungan hipotetis, untuk memperluas informasi secara spesifik dan wawasan bagi penulis, dapat juga dijadikan bahan referensi, dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh motivasi kerja, kompetensi pengelola keuangan, pengalaman kerja dan tingkat pengawasan keuangan atas kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi Undiksha

Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai media pelengkap pustaka dan sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya dan sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa.

Selain itu juga bermanfaat dalam pengembangan bidang keilmuan khususnya mengenai kualitas informasi keuangan dalam pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Konsekuensi dari pemeriksaan ini wajib untuk diinput dalam peningkatan motivasi kerja karyawan sub bidang keuangan, dapat memilih dan memilah pengelola keuangan yang berkompeten, dapat memilih karyawan yang memiliki pengalaman kerja jangka panjang di bidangnya dan tingkat pengawasan keuangan yang tinggi serta meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil pemeriksaan ini diandalkan untuk dijadikan bahan referensi berbagai kalangan tertarik untuk mengarahkan penelitian pada masalah sama dan dapat memilih dan mengetahui percakapan yang telah digambarkan dalam penelitian ini untuk eksplorasi lebih lanjut.

